

## Upaya Penguatan Nasionalisme Warga Perbatasan Papua Indonesia

La Usman

Widyaiswara Ahli Madya, BBPPKS Jayapura

E-mail: [lausman\\_03@yahoo.com](mailto:lausman_03@yahoo.com)

### Abstrak

Akibat kebijakan pemerintah pusat yang terfokus pada penguatan integrasi politik dimasa lalu serta penempatan wilayah perbatasan sebagai halaman belakang, telah berdampak pada ketertinggalan wilayah perbatasan Papua lainnya. Selain itu, adanya kebijakan transmigrasi dan Hak Pengelolaan Hutan telah menambah penderitaan warga. Kondisi ini telah melahirkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Pertanyaannya adalah bagaimana cara meningkatkan nasionalisme Keindonesian warga perbatasan Papua. Penelitian ini menggunakan pendekatan antropologi dengan beberapa teknik yaitu: studi pustaka, observasi, wawancara. Setelah semua data yang dibutuhkan terkumpul kemudian dideskripsikan, dianalisis dan diinterpretasikan, dan ditarik suatu kesimpulan. Pertama, melestarikan bahasa daerah. Kedua, mendorong pemanfaatan sistem pengetahuan komunitas setempat. Ketiga, mendorong organisasi sosial komunitas setempat. Keempat, mendorong kegiatan ekonomi berbasis keluarga. Kelima, mendorong pemanfaatan sistem peralatan hidup dan teknologi warga. Keenam, mendorong pelentarian kepercayaan masyarakat setempat. Ketujuh, mengaktifkan kegiatan kesenian pada kampung wilayah perbatasan.

**Kata kunci:** Penguatan nasional, warga perbatasan Papua, dan pendekatan antropologis.

### Abstract

*As a result of the central government's policies that focused on strengthening political integration in the past and the placement of border areas as backyards, it has had an impact on the backwardness of other Papuan border areas. In addition, the existence of transmigration policies and Forest Management Rights have added to the suffering of the residents. This condition has given rise to public distrust of the government. The question is how to increase the Indonesian nationalism of Papuan border residents. This study uses an anthropological approach with several techniques, namely: literature study, observation, interviews. After all the required data has been collected, it is described, analyzed and interpreted, and a conclusion is drawn. First, preserving local languages. Second, encourage the use of local community knowledge systems. Third, encourage local community social organizations. Fourth, encourage family-based economic activities. Fifth, encourage the use of living equipment systems and technology for residents. Sixth, encourage the preservation of local community trust. Seventh, activating art activities in border areas.*

**Keywords:** Nationalism strengthening, Papuan border residents, anthropologist approach.

## **A. PENDAHULUAN**

Wilayah perbatasan Papua (Indonesia) umumnya tersebar pada kampung, kelurahan serta distrik pada empat kabupaten serta Kota Jayapura. Akibat kebijakan pemerintah pusat yang terfokus pada penguatan integrasi politik dimasa lalu serta penempatan wilayah perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, telah berdampak pada ketertinggalan wilayah perbatasan. Selain itu, kebijakan transmigrasi dan Hak Pengelolaan Hutan (HPH) telah merugikan warga setempat. Ketertinggalan daerah mereka apabila dibandingkan wilayah transmigrasi yang kondisi fasilitas kesehatan, pendidikan, sarana transportasi dan komunikasi lebih baik akibat keberpihakan pemerintah, serta berkurangnya lahan dan makin jauhnya kegiatan meramu, berburu akibat pengusahaan hak pengelolaan hutan bagi pengusaha besar di masa lalu, berdampak pada makin susahny kehidupan warga. Mereka merasakan diskriminasi dan ketidakadilan. Menurut Hubessy (2019, p. 24) kesadaran yang menguat adanya perlakuan berbeda sebagai bangsa adalah fenomena kekerasan secara struktural, simbolik dan fisik yang dialami secara langsung dan tidak langsung oleh kebanyakan orang Papua. Juga adanya persamaan nasib bersama sebagai kelompok yang termarjinal. Kondisi ini menurut Sabara (2018, p. 23) mendorong menguatnya perasaan ketidakpuasan atau ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Menurut Tirtosudarmo (2011), masyarakat Papua memiliki nasionalisme ganda yakni nasionalisme Papua dan NKRI. Hal ini juga menunjukkan bahwa bagi masyarakat Papua, posisi kebudayaan Papua dipandang sebagai terpisah dari kebudayaan nasional (Indonesia) dan mereka merasa sebagai warga Papua dan bukan sebagai orang Indonesia. Sehingga menurut Bhakti (2005, p. 78) terdapat keinginan sebagian warga Papua untuk menentukan nasib masa depannya sendiri atau lepas dari pemerintah Indonesia. Hal ini dapat menciptakan ketidakstabilan dalam kehidupan masyarakat (Sumule, 2003, p. 34). Pada sisi lain, kondisi ini dapat menjadi lahan subur bagi separatisme yang akan mengancam eksistensi masyarakat dan keutuhan NKRI. Karena mereka akan menyebarkan hal-hal yang memperkuat ketidakpuasan di masyarakat tersebut. Situasi ini akan dapat memperkuat keberadaan mereka dalam mengembangkan ideologinya, sehingga lambat laun akan mengikis wawasan kebangsaan dan daya resistensi komunitas perbatasan yang selama ini sangat rapuh. Oleh karena itu, diperlukan penguatan nasionalisme keindonesiaan bagi warga perbatasan Papua agar dapat menangkal berbagai hal yang bisa mengganggu kestabilan sosial di wilayah tersebut.

## **B. KONSEP NASIONALISME**

Menurut Stoddard dalam Sabara (2018) bahwa nasionalisme adalah suatu

kepercayaan yang dimiliki oleh sebagian terbesar individu, di mana mereka menyatakan rasa kebanggaan sebagai perasaan memiliki secara bersama di dalam suatu bangsa. Mereka juga memiliki beberapa kesamaan. Pertama, mereka memiliki cita-cita bersama yang mengikat sebagai warga negara dan menjadi satu kesatuan wilayah NKRI. Kedua, mereka memiliki sejarah hidup bersama sehingga tercipta rasa senasib sepenanggungan. Ketiga, memiliki adat, budaya, dan kebiasaan yang sama sebagai akibat pengalaman hidup bersama. Keempat, menempati wilayah yang merupakan bagian dari kesatuan wilayah NKRI. Kelima, teroganisir dalam suatu pemerintahan kampung yang berdaulat sehingga mereka terikat dalam suatu masyarakat hukum. Kepercayaan yang dimiliki bersama oleh warga karena adanya pengakuan dan penghormatan serta pelayanan hak-hak dasar mereka secara baik. Maka penguatan kepercayaan warga kampung ini yang hilang selama ini akibat berbagai sebab di atas, menjadi mutlak untuk dipulihkan kembali. Karena akan ikut memperkuat rasa cinta tanah air sebagai bangsa Indonesia.

Maka penguatan rasa kepercayaan itu hendaknya dibangun melalui budaya komunitas kampung setempat. Kluckohn (1953, p.53) menyatakan bahwa intisari kebudayaan universal itu terdiri atas tujuh unsur yang dapat ditemukan pula pada komunitas perbatasan Papua. Antara lain: bahasa,

sistem pengetahuan, organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian, sistem religi, dan kesenian (Koentjaraningrat dalam Moleong, 2010, p.165). Ini berarti bahwa penguatan nasionalisme warga kampung ini sejalan isi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 (UU 21/2001) tentang *Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua*, yang kemudian UU ini UU 2/2021 tentang *Perubahan Kedua atas UU 21/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua*, berupa perlunya pengakuan, penghormatan hak-hak dasar serta penguatan jati diri masyarakat Papua serta pelestariannya dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

## **C. PENGUATAN NASIONALISME WARGA PERBATASAN**

### **1. Mendorong Pelestarian Bahasa Daerah**

Menurut Manan dan Thung (2011) bahasa merupakan suatu sistem ketetapan hubungan pengertian memungkinkan manusia melakukan hubungan di antara sesama dalam kehidupan bermasyarakat. Pada umumnya warga di wilayah perbatasan Papua PNG menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Dorongan penggunaan bahasa Indonesia sebagai lambang identitas nasional sebagai akibat komunikasi interaksi dengan pihak luar. Namun secara bersamaan perlu didorong penggunaan bahasa lokal pada kegiatan keluarga, antar warga, dalam perkawinan, budaya, pemerintahan kampung, ekonomi, agama, pelayanan

kesehatan, kegiatan rumah adat, serta kegiatan olah raga. Upaya ini akan mendorong pelestarian bahasa daerah sebagai identitas budaya Indonesia.

## **2. Sistem Pengetahuan Komunitas Setempat**

- a. Mendorong pemanfaatan sistem pengetahuan komunitas setempat  
Pengetahuan adalah suatu peristiwa manakala manusia menyadari relasinya dengan apa yang diketahuinya. Maka kesadaran itu dapat diartikan sebagai seluruh usaha dan hasil usaha manusia dan komunitas untuk mencukupi segala kebutuhan serta hasratnya untuk memperbaiki nasib hidupnya. Usaha tersebut terungkap baik dengan mengolah lingkungan dan dunianya untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maupun dengan menciptakan pola dan hubungan komunitasnya yang mempermudah dan memperlancar pergaulan hidupnya. Menurut Poespowardojo (1989, p. 121) usaha ini dapat dilakukan dengan memberikan makna manusia-wi kepada benda yang diolahnya dan membuat tata kehidupan komunitas menjadi lebih baik. Hal tersebut akan termanifestasikan dalam materi pengetahuan komunitas setempat. Secara umum pengetahuan masyarakat setempat meliputi dua hal. Pertama, yang bersifat teknis seperti

keterampilan berkebun (tegalan), beternak, menangkap ikan di sungai, danau, telaga serta berburu. Kedua, yang berkaitan dengan sistem sosial kemasyarakatan yang meliputi hubungan kekerabatan dengan pihak ayah dan ibu, harta waris atas tanah, dan tanggung jawab seorang anak lelaki, sistem perkawinan, hak waris jabatan, tugas dan tanggungjawab unsur pimpinan tradisional, seni suara, seni tari dan seni hias serta pengetahuan tentang keyakinan dan agama.

Maka tuntutan pelestarian pengetahuan lokal mutlak dilakukan karena meletakkan dasar pemenuhan kebutuhan ekonomi dan non ekonomi. Juga menurut Koentjaraningrat (1972, p. 38-42) karena aset budaya yang dapat dipakai untuk menunjang pembangunan. Juga perlunya mendorong pelestarian nilai budaya yang berorientasi ke masa depan, seperti nilai budaya yang berhasrat untuk mengeksplorasi lingkungan alam, nilai budaya yang menilai tinggi hasil karya manusia, serta nilai budaya tentang pandangan terhadap sesama manusia. Maka upaya di atas dapat menumbuhkan kebanggaan komunitas setempat sebagai bangsa Indonesia.

- b. Melestarikan pengaturan pemanfaatan SDA

Kearifan lokal adalah pandangan tentang dunia dan sikap serta praktek hidup yang dimiliki oleh suatu komunitas ini dan diwariskan dari generasi yang satu ke yang lain melalui sosialisasi internal dalam keluarga atau kelompok komunitas. Misalnya, pelarangan pemanfaatan sumber daya alam pada waktu tertentu atau (*hoo* atau *sasi*) yang diberlakukan pimpinan adat terhadap wilayah laut, sungai, telaga dan kawasan hutan dengan segala isinya. Menurut Usman Pelly dalam Veplum (2008,p.75) sanksi berfungsi sebagai alat kontrol untuk mengembalikan anggota komunitasnya yang menyimpang kepada tingkah laku yang normal. Sementara itu, menurut Poespowardojo (1989,p. 113) sikap demikian itu akan mampu memupuk kesadaran lingkungan dan menghindarkan tindakan yang sewenang-wenang terhadap alam melalui perusakan. Menurut *Coservation International* dalam Veplum (2010,p.34) bahwa masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan pasti lebih mengerti manfaat berbagai jenis flora dan fauna, karena hidup mereka sangat dekat dan sehari-hari bergantung pada pemanfaatan jenis makhluk hidup tersebut. Maka upaya pelestarian kearifan lokal dapat menumbuhkan kepercayaan terhadap pemerintah

serta dapat menumbuhkan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia.

### 3. Organisasi Sosial Komunitas Setempat

- a. Memanfaatkan sistem kepemimpinan adat pada kegiatan pendampingan  
Menurut Mansoben (1995, p. 123) terdapat dua tipe kepemimpinan tradisional di wilayah perbatasan Papua yakni kepemimpinan pria berwibawa dan kepemimpinan ondo-afi. Keduanya dapat digunakan pada kegiatan pendampingan terhadap warga. Karena menurut Malinowski (1944, p. 267) terdapat tiga fungsi utama organisasi politik tradisional. Pertama, fungsi kontrol sosialnya mempertahankan keadaan ekuilibrium antara golongan-golongan atau kelompok-kelompok, lembaga-lembaga dan kepentingan-kepentingan yang berbeda dalam masyarakat dengan menggunakan kekuasaan sehingga tidak terjadi benturan di antara mereka dalam kehidupan komunitas ini. Kedua, menjamin dan melaksanakan hukum dan ketertiban dalam masyarakat dengan menggunakan sanksi dalam bentuk materil maupun moral dengan tidak pandang bulu. Ketiga, mengontrol dinamika kehidupan komunitas agar tetap tenang melalui mekanisme kerja para pembantunya.

Implementasi fungsi di atas terlihat pada keterlibatan mereka pada penyelesaian masalah dalam kampung, menjadi juru bicara dalam memberikan informasi kepada warganya, dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan budaya komunitas setempat. Juga keterlibatan mereka melalui lembaga masyarakat adat kampung sangat membantu intervensi pemerintah dalam program kegiatan pelayanan terhadap masyarakat. Maka kondisi ini dapat menumbuhkan kepercayaan warga terhadap pemerintah dan menumbuhkan rasa cinta tanah air sebagai bangsa Indonesia.

- b. Melibatkan kepemimpinan kampung dalam tiap kegiatan

Keikutsertaan mereka juga akan ikut mendorong terciptanya wilayah keamanan yang semakin kondusif. Karena dimensi pemimpin kampung dalam konteks ini berbijak 3 pilar dasar. Pertama, kampung sebagai pilar ketahanan ekonomi untuk mengurangi atau meminimalisir terjadinya arus urbanisasi dan migrasi penduduk dari kampung ke kota ataupun sebaliknya dengan berbagai alasan. Kedua, kampung sebagai pilar ketahanan budaya dan otonomi khusus, karena kampung secara faktual dan realitas memperlihatkan eksistensi dan jati diri dalam konteks

kekhususan. Ketiga, kampung sebagai ketahanan keamanan nasional, artinya jika masyarakat yang hidup di kampung sejahtera dan kuat secara mandiri, maka dengan sendirinya mereka akan resisten dan menjadi simpul untuk menjaga keamanan, sehingga akan tercipta keadaan yang aman. Maka penguatan kepemimpinan kampung akan mendorong penumbuhan rasa kepercayaan warga terhadap pemerintah.

- c. Mendorong keikutsertaan warga dalam mengawasi jalannya pemerintahan

Sebagai warga negara yang baik perlu terlibat secara aktif dalam kegiatan pembangunan di kampung, melalui perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan kegiatan guna peningkatan kesejahteraan sosial warga kampung. Hal ini juga merupakan upaya untuk mewujudkan keinginan bersama berupa kondisi yang lebih baik. Keinginan ini didasari realitas bahwa kondisi kampung wilayah perbatasan sangat tertinggal. Pada sisi lain, partisipasi warga juga dapat mencegah pihak-pihak tertentu yang ingin menyelewengkan dana untuk kepentingan pribadi. Maka keikutsertaan demikian merupakan wujud rasa cinta dan tanggung jawab terhadap kemajuan bersama warga kampung dalam wilayah NKRI.

- d. Memahami ikatan kekerabatan komunitas setempat secara baik

Sistem kekerabatan adalah serangkaian aturan yang mengatur penggolongan atau hubungan seseorang dengan orang lain dalam sebuah keluarga. Komunitas perbatasan, umumnya terdiri dari keluarga, dan kekerabatan yang terbangun karena hubungan saudara (darah) atau perkawinan. Sistem kekerabatan ini menurut Turner dalam Mansoben (1995, p. 5), pada hakekatnya memberikan arahan bagi perhatian orang dalam pemilihan alat-alat tertentu atau penentuan cara tertentu yang hendak dipakai untuk mencapai tujuannya. Simbol tersebut juga bersifat afektif, artinya dapat membangkitkan emosi, atau dapat menggoncangkan perasaan dan sentimen. Juga simbol di atas bersifat konatif, dalam arti mendorong orang untuk beraksi. Fungsi ekonominya adalah mendorong kegiatan ekonomi guna memenuhi nafkah bagi anggota keluarganya. Sistem ini menuntut anak lelaki yang sudah menikah untuk menyantuni kedua orang tuanya yang sudah tua serta saudara perempuannya yang belum menikah. Fungsi kelembagaannya, terjaganya peran tiap orang menyangkut hak dan kewajibannya dalam jaringan kekerabatan. Jadi merawat sistem

kekerabatan dalam wilayah ini sebagai bentuk penghormatan terhadap penduduk asli dalam kehidupan bermasyarakat, maupun berbangsa. Juga merupakan penghormatan terhadap hak penduduk asli atas penguasaan lahan atau tanah di wilayah tersebut. Selain, mencegah munculnya konflik tanah, juga dapat memupuk kebanggaan terhadap penduduk asli setempat. Maka warga perbatasan perlu diberikan status kewarganegaraan Indonesia melalui kepemilikan kartu tanda penduduk. Upaya ini juga akan membantu mengontrol warga wilayah perbatasan dari aktivitas yang menyimpang dari hukum serta memperkuat jati diri sebagai warga negara Indonesia.

- e. Melestarikan simbol pemerintahan kampung

Dalam Pasal 1 point I, Bab I Ketentuan Umum UU 21/2001 tentang *Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua*, disebutkan bahwa Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah Kabupaten atau Kota. Hal ini berarti kampung di Papua bersifat genealogis yaitu berdasarkan asal usul keturunan

yang mengelompok dalam suatu kampung. Juga mempunyai hubungan *consanguinal* yaitu merupakan satu keturunan atau kerabat dan mempunyai hubungan dengan kampung lain, karena hubungan perkawinan serta dipimpin seorang pemimpin tradisional dari kalangan mereka sendiri. Maka upaya di atas akan menumbuhkan kebanggaan identitas kelembagaan pemerintahan nasional di Papua.

f. Menjaga kepemilikan status tanah warga

Hasil studi Wenehen (2007, p. 34; Suparlan, 1995, p. 38) memperlihatkan bahwa pada masyarakat perbatasan Papua memiliki status penguasaan tanah ulayat bersifat komunal baik pada tingkat suku maupun klan. Status tanah yang demikian menyebabkan setiap klan mengakui sebagai wilayah kekuasaan adatnya. Pengaturan pemanfaatan tanah pada lokasi tertentu bagi tiap anggota klan diwariskan dari pimpinan klan kepada anggota keluarga klan, terutama pada anak lelaki. Pada komunitas yang memiliki sistem kekerabatan yang bersifat patrilineal, tanah beserta sumber daya alam di dalamnya, umumnya diwariskan kepada anak lelaki. Hal tersebut dimaksudkan agar lahan tersebut dapat dimanfaatkan oleh yang ber-

sangkutan ketika membangun keluarga baru. Kepemilikan lahan tersebut tersebut tidak hilang walaupun pemiliknya telah berpindah dan menetap di wilayah komunitas lain. Untuk menjaga kepemilikan tanah adat warga, maka pemerintah perlu memberikan jaminan kepastian tanah warga dengan cara menerbitkan hak kepemilikan tanah bersifat komunal secara hukum (sertifikasi tanah). Upaya tersebut, akan menumbuhkan kepercayaan dan rasa cinta air warga perbatasan terhadap pemerintah Indonesia.

#### **4. Mendorong Kegiatan Ekonomi Berbasis Keluarga Bukan Kelompok**

Mendorong kegiatan ekonomi berbasis keluarga mutlak dilakukan. Pengerjaannya sesuai pembagian kerja dalam keluarga. Aktivitas ini dilakukan seorang suami, dimulai dari pemilihan lahan bekas kebun yang memiliki tinggi tumbuhan sekitar lima meter, karena dianggap memiliki tingkat kesuburan yang tinggi. Kemudian dilakukan penebangan dan dilanjutkan pemotongan batang kayu menjadi ukuran yang lebih kecil dengan menggunakan peralatan. Lalu dibiarkan selama sebulan dengan maksud semua tumpukan rumput menjadi kering. Pada saat bersamaan dibuatkan pagar mengelilingi kebun oleh laki-laki dan perempuan dengan tujuan mencegah binatang yang sering merusak tanaman.



Lalu dilakukan pembakaran terhadap tumpukan rumput tersebut. Selanjutnya dilakukan pembersihan ranting kayu yang belum sempat terbakar, dengan cara diletakkan di atas batang kayu yang belum terbakar pada beberapa tempat yang berdekatan. Setelah tanah disiapkan dengan cangkul lalu sesuai dengan jenis tanaman, lalu dilakukan penanaman oleh wanita (istri) dengan posisi membentuk garis lurus dengan maksud memudahkan kegiatan penyemprotan pupuk daun ataupun akar. Tahapan berikutnya dilakukan perawatan selama seminggu sebelum dilakukan pemanenan. Kegiatan belakangan ini diawali dengan pengecekan harga pasar untuk keempat jenis tanaman tersebut. Juga penyiapan angkutan para tengkulak untuk menampung atau membeli hasil panen di tempat. Kegiatan pemanenan jenis tanaman sejak pagi hari dengan melibatkan semua anggota keluarga. Hasil pemanenan juga diberikan kepada tetangga untuk dinikmati. Tahapan terakhir adalah masa pasca panen. Kegiatan ini diawali dengan penyemprotan untuk pengeringan semua tanaman yang telah mengalami pencapaian produksi maksimal. Kemudian diikuti dengan pembiaran lahan selama satu minggu. Setelah itu dilakukan pembersihan dengan cara dicabut dan dilakukan pembakaran. Lalu diikuti dengan tahapan penanaman. Kegiatan penanaman untuk tiap jenis tanaman dilakukan 3 kali dalam setahun. Setelah itu dilakukan penanaman tanaman jangka panjang seperti pinang,

kelapa, rambutan serta durian. Menurut Petocz (1987, p. 154) sistem pertanian seperti ini sangat cocok bagi daerah yang berpenduduk jarang, dan kecil sekali penanaman modalnya. Untuk memenuhi kebutuhan protein keluarga serta kegiatan sosial, dilakukan suami melalui kegiatan penangkapan ikan pada sungai, telaga atau rawa atau berburu hewan seperti babi hutan, rusa dan lain sebagainya di hutan. Aktivitas pemeliharaan hewan, seperti babi dan ayam dilakukan keluarga dengan cara dilepas. Hal ini berarti bahwa kegiatan pendampingan ekonomi yang didorong dalam bentuk kelompok tidak sesuai dengan kebiasaan ekonomi komunitas setempat. Itulah sebabnya mengapa pola kegiatan ekonomi yang didorong selama ini dalam bentuk kelompok tidak berhasil dalam wilayah Papua. Maka dorongan kegiatan ekonomi yang berbasis keluarga akan ikut menumbuhkan rasa cinta tanah air Indonesia warga perbatasan.

## **5. Pemanfaatan Sistem Peralatan Hidup dan Teknologi**

Alat-alat produktif yang sering digunakan warga dalam kegiatan ekonomi untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya, terus mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Semula kegiatan tegalan hanya menggunakan tombak, terutama untuk membuat lubang guna kegiatan penanaman benih tanaman tertentu. Seiring dengan interaksi dengan dunia luar, kini warga

sudah menggunakan kampak, parang, serta sabit yang dimiliki dengan cara dibeli dalam pengerjaan lahan tegalan. Juga sudah digunakan *handspray*, pupuk, obat-obatan serta pestisida yang merupakan bantuan instansi teknis terkait untuk mengolah lahan yang tidak produktif untuk dimanfaatkan kembali. Kini adanya program peningkatan kegiatan ekonomi dari instansi teknis terkait, mereka juga telah menggunakan jaring, nelon serta kail untuk menangkap ikan di laut pada musin teduh serta di kali atau telaga pada musim gelombang. Mereka juga telah mengenal pengelolaan hasil tangkapan dengan cara disimpan dalam *coolbox* serta diawetkan sebelum dipasarkan. Sementara itu peralatan untuk berburu yang digunakan seperti panah serta busur. Wilayah perburuan hewan juga harus sesuai dengan lingkungan yang telah ditentukan pemimpin adat setempat. Oleh karena itu, intervensi pemerintah pada kegiatan ekonomi warga dengan mendorong peralatan yang telah digunakan selama ini, akan ikut menumbuhkan kebanggaan tersendiri bagi warga. Upaya ini akan ikut menumbuhkan rasa cinta tanah air Indonesia.

## **6. Sistem Religi/Kepercayaan Masyarakat**

- a. Mendoakan kegiatan keagamaan  
Penguatan kegiatan keagamaan sangat penting dilakukan untuk penumbuhan identitas komunitas perbatasan melalui ibadah gereja bagi para ba-

pak, ibu, pemuda serta anak dan remaja dalam bentuk sekolah minggu. Saat bersamaan dilakukan pengumpulan sumbangan dari jemaah untuk mendukung kegiatan pelayanan gereja bagi mereka yang mengalami keduakaan, perayaan hari besar keagamaan seperti Natal, serta Paskah. Penjadwalan keterlibatan secara rutin terhadap petugas pelayanan keagamaan dari organisasi keagamaan seperti Sinode GKI akan makin memantapkan kehidupan keagamaan di wilayah ini. Selain itu, adanya perhatian pemerintah dalam bentuk penghargaan (materi) terhadap tokoh agama yang sering melakukan pembinaan terhadap warganya, juga akan ikut menumbuhkan kebanggaan warga perbatasan.

Perayaan kegiatan keagamaan tiap tahun seperti Natal dan Paskah sebagai upaya untuk mewariskan penjabaran teks kitab suci, yang berisikan perintah-perintah, petunjuk-petunjuk, dan larangan-larangan Tuhan. Interaksi keagamaan ini dapat mendekatkan warga dari berbagai struktur sosial seperti warga biasa, pimpinan klan, pesuruh luar dan dalam, pimpinan adat, tokoh agama, yang terdapat di dalam dan di luar kampung, latar belakang etnis, pekerjaan agama, bahkan latar belakang kenegaraan seseorang dalam satu

wadah kebersamaan. Hal ini sejalan dengan pendapat Durkheim dalam Mair (1977, p. 237) bahwa aktivitas keagamaan akan menciptakan ikatan kesadaran umum dalam keadaan emosi yang diperkuat oleh ketergantungan setiap individu atas kehidupan dan tatanan masyarakat. Kondisi belakangan ini akan bermanfaat dalam mengurangi konflik sosial yang biasanya berkaitan dengan persoalan tanah dan lain sebagainya. Fungsi kegiatan ini juga memperkuat posisi para penginjil dalam kehidupan warga. Mereka termasuk tiga pilar utama dalam kehidupan masyarakat kampung.

Dalam perspektif sosiologi, fungsi agama adalah memelihara dan menumbuhkan sikap solidaritas di antara sesama individu dan kelompok. Solidaritas merupakan bagian dari kehidupan sosial keagamaan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat beragama, atau, lebih tepatnya, solidaritas merupakan ekspresi dari tingkah laku manusia beragama. Selain itu, menurut Durkheim dalam Ghazali (2011, p. 33), fungsi agama mendukung dan melestarikan masyarakat yang ada. Agama bersifat fungsional terhadap persatuan dan solidaritas sosial antara warga komunitas Skouw Sae.

b. Menjaga perayaan ritual dalam rumah adat

Menjaga perayaan ritual dalam rumah adat perlu dijaga. Karena rumah adat dianggap sebagai tempat tinggalnya para nenek moyang yang telah meninggal pada komunitas perbatasan Papua. Tindakan seperti ini juga menyatakan pengakuan mereka terhadap kehadiran dan kekuasaan nenek moyang. Menurut Rappaport (1971, p. 226-235) bahwa roh nenek moyang akan selalu melindungi dan memberi kekuatan kepada keturunan mereka yang masih hidup. Maka melalui kegiatan ini mereka mengharapkan perbuatan seperti ini menyebabkan kekuatan-kekuatan alam berbaik hati terhadap kehidupan mereka. Selain itu, keikutsertaan semua warga pada ritual di atas juga dipandang sebagai sakralisasi perubahan-perubahan status sosial atau sebagai pemisahan satu peran sosial dari gangguan peran-peran sosial lainnya. Ritual yang dilaksanakan secara kolektif berfungsi sebagai arena kongregasi berdampak pada peningkatan ikatan sentimen kelompok dan solidaritas sosial (Suhardi, 2009, p. 2). Maka kegiatan ini, selain mendorong dan melestarikan kegiatan ritual dalam rumah adat juga dapat menumbuhkan rasa kepercayaan dan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia.

## 7. Aspek kesenian

- a. Mengaktifkan kegiatan kesenian pada kampung wilayah perbatasan  
Mengaktifkan kegiatan kesenian (seni tari, seni suara) pada kampung wilayah perbatasan mutlak dilakukan. Karena aktivitas kelembagaan kesenian yang sering melibatkan warga ini bertujuan memperoleh kesenangan, dilaksanakan dengan gerakan yang serasih pada lapangan terbuka, mengenakan buluh burung cenderawasih, rok yang terbuat dari tali hutan, tifa sebagai alat musik untuk mengiringi lagu yang dinyanyikan secara bersama. Selain itu, kesediaan individu untuk terlibat dalam irama dan gerak secara bersama pada kegiatan dansa adat, tanpa memandang latar belakang klan, agama, pendidikan, serta jabatan dalam masyarakat, merupakan penyesuaian penting dalam relasi pada bidang ini. Karena fungsi pendidikannya adalah mewariskan kesenian pada generasi muda serta tentang sejarah kampung. Hal tersebut menuntut mereka agar selalu membangun hubungan baik dengan keluarganya yang berada di daerah asal. Selain itu, menurut Sedyawati (1980, p. 6) bahwa fungsi kesenian adalah sebagai bentuk penyaluran daya cipta, penyaluran kebutuhan akan rasa aman, penyaluran energi

yang berlebihan, penyaluran rasa tertekan, sarana sosialisasi, sarana pemujaan gaib, sarana penyampaian gagasan, sarana rekreasi, serta sarana pembentukan rasa kelompok. Berbagai fungsi kesenian tersebut bisa terwujud secara serempak dalam implementasinya. Fungsi kelembagaannya adalah memperkuat hubungan pemimpin klan dan pemimpin etnis dengan warga pada kampung ini. Dengan demikian dapat disimpulkan upaya mendorong kegiatan kesenian pada komunitas perbatasan, dapat menumbuhkan kesenangan dan kepercayaan warga. Pada akhirnya kegiatan ini dapat menumbuhkan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia.

- b. Mendorong penghargaan terhadap simbol atau lambang identitas nasional  
Penghargaan terhadap lambang identitas nasional seperti dasar negara Pancasila, bendera negara, serta lagu kebangsaan perlu terus didorong pada warga perbatasan. Semakin mantapnya penghayatan dan pengamalan Pancasila sebagai ideologi nasional akan menjadi pondasi untuk menyatukan masyarakat perbatasan. Dalam kaitan dengan ini, maka bisa dilakukan lomba pengapalan Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 pada tiap perayaan hari-hari besar nasional. Demikian pula bendera negara merah

putih termasuk identitas nasional yang harus dihormati. Caranya dengan mengibarkannya pada tiap hari besar nasional seperti hari kemerdekaan. Saat bersamaan dapat diikuti dengan menyanyikan lagu Indonesia raya. Semakin mantapnya kesadaran masyarakat dalam menji-wai Pancasila, UUD 1945, bendera merah putih dan lagu Indonesia rata, akan menjadi daya tangkal yang tangguh terhadap setiap ancaman yang tidak sesuai dan atau bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Upaya ini akan memperkuat pengenalan identitas nasional di kalangan warga perbatasan. Dan kesemua ini dapat menumbuhkan rasa cinta tanah air Indonesia.

- c. Mendorong keterlibatan dalam perayaan upacara hari besar nasional dan lokal
- Dalam kehidupan bernegara sering kita merayakan upacara bendera setiap hari senin, hari kemerdekaan, hari kesaktian Pancasila, hari lahir kota Jayapura dan lain sebagainya. Dari aspek kognitif melalui perayaan itu diharapkan warga KAT dapat menghayati makna perayaan hari besar tersebut untuk selanjutnya dijadikan bahan inspirasi untuk melakukan sesuai yang lebih besar. Dari aspek konotatif, melalui perayaan hari besar tersebut diharapkan

dapat menumbuhkan komitmen dari diri warga untuk meneruskan dan merealisasikan makna tersebut dalam kehidupan kesehariannya untuk kepentingan pribadi, keluarga, serta masyarakat dalam lingkungan yang luas. Kesadaran untuk tidak mengalami kesalahan serupa atau membuka ruang bagi terulangnya peristiwa tertentu yang dapat memecahkan belah bangsa Indonesia. Upaya ini juga merupakan wujud kesadaran akan rasa cinta tanah air Indonesia.

- d. Mendorong pengenalan sejarah
- Dalam sejarah nasional Indonesia terdapat istilah Jas merah atau jangan sekali-kali melupakan sejarah. Ini adalah sebuah ungkapan yang menyatakan pada kita bahwa sejarah merupakan bagian penting dari sejarah suatu bangsa (Indonesia), sehingga mengenalkan sejarah sangat penting guna memahami siswa atau anak tentang bagaimana hebatnya perjuangan para pahlawan dalam memperjuangkan kemerdekaan. Pemerintah Indonesia telah menganugerahkan gelar pahlawan nasional dari wilayah Papua seperti Frans Kaisepo, Silas Papare dan lain sebagainya. Mereka adalah para pejuang yang telah membebaskan Papua dari penguasaan Belanda. Mereka juga yang pertama kali memperkuat rasa cinta tanah air terhadap negara Indonesia. Terdapat

pula pejuang yang berasal dari beberapa daerah kabupaten atau kota yang diabadikan melalui nama-nama tertentu karena jasanya yang besar dalam memperjuangkan daerahnya. Maka melalui pengenalan beberapa tokoh lokal yang telah diberi gelar kepahlawanan tersebut, dapat menciptakan kebanggaan masyarakat perbatasan sebagai bangsa Indonesia karena kontribusinya dalam membebaskan bangsanya dari penjajahan Belanda.

- e. Menumbuhkan rasa syukur atas melimpahnya berbagai sumber alam Provinsi Papua yang merupakan bagian dari negara Indonesia dan tersebar pada beberapa wilayah kabupaten, distrik dan kampung memiliki berbagai sumber daya alam yang melimpah. Misalnya, tanah yang luas dengan berbagai tumbuhan di atasnya sebagai sumber pangan, sandang dan papan. Juga adanya sungai atau kali, telaga, serta rawa dengan berbagai jenis ikan di dalamnya sebagai sumber protein, telah memberikan kontribusi sebagai penyedia sumber bahan pangan secara berkesinambungan. Kesemua sumber daya alam tersebut telah menghidupkan keluarga, klan, komunitas dari waktu ke waktu atau telah melestarikan keberlangsungan kehidupan mereka sejak dulu,

sekarang bahkan pada masa depan. Kesadaran warga akan pentingnya keberadaan SDM dalam pengelolaan sumber daya alam di wilayahnya, juga menumbuhkan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia yang memiliki kekayaan alam yang melimpah. Dan ini akan menumbuhkan kesadaran warga untuk memelihara, menjaganya dari pihak-pihak lain yang ingin merusaknya.

- f. Mengenalkan keragaman budaya yang ada di Provinsi Papua dan Indonesia

Provinsi Papua memiliki 520 bahasa daerah. Ini menunjukkan bahwa di wilayah ini terdapat 520 etnik (suku bangsa) yang tersebar mulai dari bagian utara (kota Jayapura) hingga wilayah selatan (Kabupaten Merauke). Tiap kelompok etnik ini memiliki kebudayaan sendiri yang perwujudannya terlihat dalam bahasa dan sistem-sistem komunikasi, kehidupan ekonomi dan teknologinya, kehidupan keagamaan dan ungkapan-ungkapan kesenian, struktur politik dan struktur sosial serta sistem kekerabatan yang dimilikinya (Suparlan, 1995, p. 35). Perbedaan kebudayaan masyarakat pendatang dengan kebudayaan masyarakat yang didatangi terutama disebabkan oleh faktor-faktor ekologi atau lingkungan alam dan fisik, dimana masing-masing

warga masyarakat yang bersangkutan itu harus dapat mengadaptasikan dirinya untuk dapat tetap mempertahankan kelangsungan hidupnya. Dalam proses-proses adaptasi tersebut kebudayaan yang mereka miliki dijadikan sebagai acuan penyesuaian terhadap berbagai perubahan yang terjadi di wilayah baru. Mendorong kesadaran keberagaman berbagai etnik dalam kehidupan bermasyarakat, akan melahirkan kesadaran sebagai bangsa Indonesia.

#### D. PENUTUP

Dari pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa penguatan nasionalisme warga perbatasan dapat dilakukan dalam beberapa cara. Pertama, melestarikan bahasa daerah. Kedua, mendorong pemanfaatan sistem pengetahuan komunitas setempat. Ketiga, mendorong organisasi sosial komunitas setempat. Keempat, mendorong kegiatan ekonomi berbasis keluarga. Kelima, mendorong pemanfaatan sistem peralatan hidup dan teknologi warga. Keenam, mendorong pelestarian kepercayaan masyarakat setempat. Ketujuh, mengaktifkan kegiatan kesenian pada kampung wilayah perbatasan

#### Referensi

- Bhakti, I.N. (2005). Hak Menentukan Diri Sendiri Jenis Baru di Papua Pilihan antara Kemerdekaan dan Otonomi. Dalam *Konflik Kekerasan Internal Tinjauan Sejarah, Ekonomi Politik dan Kebijakan di Asia Pasifik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Ghazali, A.M. (2011). *Antropologi Agama Upaya Memahami Keragaman Kepercayaan, Keyakinan dan Agama*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Hubessy, F.K. (2019). Sakralitas Nasionalisme Papua: Studi Kasus Pergerakan Alinasi Mahasiswa Papua. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*. Volume 6, Nomor 1, Januari 2019.
- Kluckohn, C. (1952). Values and Value Orientation in the Theory of Action: An Exploration in Definition and Classification. Dalam Tarcott Parson dan Edward E. Shill (Eds). *Toward a General Theory of Action* Cambridge: Harvard University Press.
- Koentjaraningrat, (1972). *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*. Jakarta: Penerbit Dian Rakyat.
- Mair, L. (1977). *An Introduction to Social Anthropology*. Oxford: Clarendon Press.
- Malinowski, B. (1944). *A Scientific Theory of Culture and Other Essays*. Chapel Hill: University of North Carolina Press.
- Manan, M. A & Thung J. L. (2011). *Nasionalisme dan Ketahanan Budaya Indonesia: Sebuah Pengantar dalam Nasionalisme dan Ketahanan Budaya di Indonesia Sebuah Tantangan*. Jakarta: LIPI Press bekerja sama dengan Yayasan Obor Indonesia.
- Mansoben, J. R. (1995). Kebinekaan Sistem Kepemimpinan di Propinsi Irian Jaya. *Membangun Masyarakat Irian Jaya*. Jakarta: Puslitbang Kependudukan dan Ketenagakerjaan LIPI.

- Moleong, L. J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Petocz, R. G. (1987). *Konservasi Alam dan Pembangunan di Irian Jaya*. (Terj. Slamet Soeseni). Jakarta: PT. Temprint.
- Poespowardojo, S. (1989). *Strategi Kebudayaan Suatu Pendekatan Filosofis*. Jakarta: Penerbit PT Gramedia.
- Rappaport, R.A. (1971). Ritual Regulation of Environmental Relation among a New Guinea People. Dalam Cohen, Y.A. (Ed.). *Man in Adaption: The Institutional Framework* (pp. 226-235). New York: Aldine Atherton.
- Sabara (2018). Split Nasionalisme Generasi Muda Papua di Kota Jayapura: Perspektif Teori Identitas. *Jurnal Politik Profetik*. Volume 6, Nomor 1.
- Sedyawati, E. (1980). *Pengantar dalam beberapa Masalah Perkembangan Kesenian Indonesia Dewasa ini*. Jakarta: Fakultas Sastra Universitas Indonesia.
- Suhardi (2009). *Alam-Religi Solidaritas Sosial di Papua dan Jawa: Terawang Antropologi*. Jogjakarta: Scholarship for Intercultural Studies Program/Program Beastudi Kajian Antarbudaya Pusat Studi Asia Pasifik Universitas Gadjah Mada.
- Sumule, A. (2003). *Mencari Jalan Tengah Otonomi Khusus Provinsi Papua*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Suparlan, P. (1995). Keaneragaman Kebudayaan Irian Jaya, Strategi Pembangunan dan Transformasi Orang Irian ke dalam Masyarakat Indonesia. *Proseding Seminar Membangun Masyarakat Irian Jaya*. Jakarta: Puslitbang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- Tirtosudarmo, R. (2011). Nasionalisme dan Ketahanan Budaya: Beberapa Catatan dari Perspektif Demografis. Dalam *Nasionalisme dan Ketahanan Budaya di Indonesia sebuah tantangan*. Jakarta: LIPI Press bekerja sama dengan yayasan Obor Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang *Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua*.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang *Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua*.
- Veplum, D. (2008). *Partisipasi Komunitas Lokal Terhadap Pembangunan Wilayah Perbatasan Antara Republik Indonesia dan Papua New Guinea di Provinsi Papua (RI-PNG)*. Jayapura: Universitas Cenderawasih.
- \_\_\_\_\_ (2010). *Pemberdayaan Komunitas Lokal Terhadap Pembangunan Wilayah Perbatasan Antara Republik Indonesia dan Papua New Guinea di Distrik Muara Tami Kota Jayapura*. Jayapura: Universitas Cenderawasih.
- Wenehen (2007). *Kondisi Sosial Ekonomi dan Lingkungan di Kawasan Perbatasan Papua, Studi di Ditrik Muara Tami (Kota Jayapura) dan Distrik Waris (Kabupaten Keerom) Provinsi Papua*. Jayapura: Kemitraan BP3D Provinsi Papua Dan Lembaga Penelitian Universitas Cenderawasih.